

ABSTRACT

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud.

The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-Procurement effectiveness. Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementation in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained.

Research results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises.

Keywords : E-Procurement, Information Productivity, Business Process Modeling, Effectivenss, Transparency

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi *e-Procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi *e-Procurement* bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi *e-Procurement*. Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi *e-Procurement* di instansi pemerintah dengan menggunakan metode *Information Productivity*. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode *Information Productivity* dalam mengukur keefektifan implementasi *e-Procurement* di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks *Information Productivity* lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa *e-Procurement* dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

Kata Kunci : *E-Procurement*, *Information Productivity*, Pemodelan Proses Bisnis, Keefektifan, Transparansi